

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Dari tahun ketahun masalah ini terus menerus belum dapat terselesaikan. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan adalah masalah yang kompleks yang harus dapat terselesaikan. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering menjadi tolak ukur kemiskinan, banyaknya pengangguran yang sangat terlihat oleh mata.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada pada masyarakat dan memberikan peluang kepada masyarakat miskin guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kemiskinan terjadi akibatnya banyaknya jumlah orang dalam satu keluarga, ekonominya kurang baik, lapangan kerja yang masih kurang, pendidikan yang rendah, dan kurangnya keterampilan. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU no.10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam INPRES (Instruksi Presiden) no 3 tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Langkah pertama pengentasan kemiskinan adalah dengan mengidentifikasi kelompok dan wilayah sasaran dengan tepat. Program pengentasan dan pemulihan

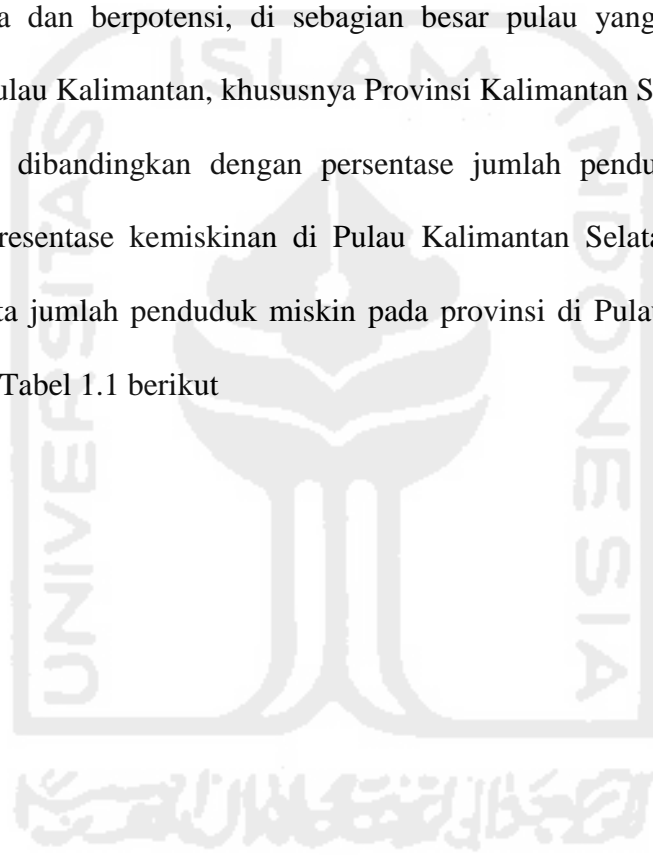
nasib orang miskin tergantung dari ketepatan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan di mana dia berada. Aspek di mana “si miskin” dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis.

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah Indonesia juga meluncurkan program penanggulangan kemiskinan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan Pengembangan UMKM, PNPM Mandiri. Program-program tersebut belum mampu mengurangi masyarakat Indonesia dari jurang kemiskinan. Keadaan ini sudah seharusnya menjadi sebuah evaluasi diri bagi pemerintah untuk dapat terus merencanakan serta mengambil sebuah kebijakan yang dapat membawa Indonesia keluar dari jurang kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri, usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas akan tetapi hasilnya belum cukup memuaskan.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, dan dilaksanakan secara terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa pulau yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar seperti di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sedangkan untuk sumber daya manusia sendiri Indonesia sangat kaya dan berpotensi, di sebagian besar pulau yang ada di Indonesia, termasuk pulau Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan.

Jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin secara nasional, presentase kemiskinan di Pulau Kalimantan Selatan termasuk tinggi. Adapun data jumlah penduduk miskin pada provinsi di Pulau Kalimantan dapat dilihat dari Tabel 1.1 berikut



**Tabel 1.1**  
**Presentase Penduduk Miskin Di Provinsi Kalimantan Selatan (%)**

Kabupaten	2009	2010	2011	2012	2013
Tanah Laut	5.11	5.12	4.85	4.55	4.33
Kota Baru	5.55	5.45	5.18	4.85	4.73
Banjar	3.69	3.34	3.17	2.97	2.84
Barito Kuala	5.61	5.72	5.41	5.12	5.12
Tapin	4.93	5.57	5.29	4.99	3.41
Hulu Sungai Selatan	7.32	7.66	7.25	6.9	6.67
Hulu Sungai Tengah	5.73	6.32	5.98	5.68	5.57
Hulu Sungai Utara	7.29	7.76	7.31	6.94	6.92
Tabalong	6.83	6.53	6.22	5.83	6.15
Tanah Bumbu	5.89	6.48	6.17	5.47	5.2
Balangan	7.22	7.74	7.31	6.85	6.17

Sumber: BPS (2015).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinannya masih tinggi. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan penduduk suatu wilayah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode (Sasana, 2001). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Simanjuntak, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi pengeluaran pembangunan terhadap pengeluaran pemerintah daerah total mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan 2009 – 2013?
2. Apakah PDRB per kapita mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2009 – 2013?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proporsi pengeluaran pembangunan terhadap pengeluaran pemerintah daerah total mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2009–2013.
- b. Untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2009 – 2013.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah penduduk miskin pada Kabupaten di Kalimantan selatan.
- b. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten di Kalimantan selatan.
- c. Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan pada Kabupaten di Kalimantan selatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan ini yang menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAR TEORI**

Bab ini secara rinci menguraikan tentang kajian pustaka, landasan teori dari variabel-variabel yang digunakan dari teori-teori yang relevan serta hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi tentang pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada topik yang sama. Landasan teori berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang teliti. Landasan teori ini memberikan diskusi yang lengkap mengenai hubungan antar variabel yang terlibat. Hipotesis penelitian yang disusun merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, perumusan model analisis atau metode analisis.

## **BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang deskripsi data, pengujian hipotesis atas hipotesis yang dibuat, pembahasan serta hasil penelitian dari pengujian tersebut.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan dan saran untuk penelitian selanjutnya.